

**OPTIMALISASI PEMUNGUTAN RETRIBUSI OBJEK
WISATA PANTAI BATUKARAS OLEH PETUGAS TOLGATE
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PANGANDARAN**

Dasep Leo Permadi¹, Agus Nurulsyam S.², R. Didi Djadjuli³

Universitas Galuh, Ciamis, Indonesia^{1,2,3}

E-mail : dasepleopermadi@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh hasil observasi yang menunjukkan belum optimalnya Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Kepariwisata oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Pangandaran. Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut untuk mengetahui optimalisasi pemungutan retribusi objek wisata Pantai Batukaras oleh Petugas Tolgate Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis. Informan sebanyak 10 orang. Teknik pengumpulan data adalah studi kepustakaan, studi lapangan (observasi dan wawancara) dan dokumentasi. Penulis menggunakan teknik analisis data kualitatif melalui pengolahan data hasil wawancara dan observasi untuk ditarik kesimpulan sehingga dapat menjawab permasalahan dalam penelitian. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa : pemungutan retribusi objek wisata Pantai Batukaras oleh Petugas Tolgate Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran belum dilaksanakan secara optimal hal ini dikarenakan petugas kesulitan dalam memperluas basis penerimaan retribusi karena keterbatasan sarana atraksi wisata, selain itu petugas kesulitan dalam memperkuat proses pemungutan retribusi objek wisata karena masih kurangnya kesadaran pengunjung untuk membayar retribusi masuk objek wisata sesuai dengan yang ditetapkan, petugas kesulitan dalam meningkatkan pengawasan karena kurangnya dukungan berbagai pihak dalam membantu melakukan pemeriksaan pemungutan retribusi objek wisata, serta petugas kesulitan dalam meningkatkan efisiensi administrasi dalam pemungutan retribusi objek wisata selain itu petugas kesulitan dalam meningkatkan kapasitas penerimaan sehingga pencapaian penerimaan retribusi objek wisata tidak tercapai sesuai target. Begitupula dengan hasil observasi penulis diketahui bahwa pemungutan retribusi objek wisata Pantai Batukaras oleh Petugas Tolgate Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran belum dilaksanakan secara optimal hal ini dikarenakan adanya wabah covid-19 yang menyebabkan target penerimaan retribusi objek wisata tidak tercapai secara optimal mengingat seringnya objek wisata ditutup

sehingga petugas tidak dapat melakukan pemungutan retribusi objek wisata secara optimal.

Kata Kunci : *Optimalisasi, Retribusi Objek Wisata, Petugas Tolgate, Batu*

PENDAHULUAN

Sejak diberlakukannya Otonomi Daerah sesuai dengan Undang- Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang - Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, membuat suatu daerah harus mempunyai kemampuan ekonomi yang memadai agar jalannya pemerintahan tidak terganggu dan pembangunan dapat terlaksana dengan baik. Suatu daerah dituntut mandiri secara fiskal untuk dapat membiayai pengeluaran daerahnya masing- masing.

Dengan adanya Undang-Undang tentang Pemerintah Daerah yang menetapkan pajak dan retribusi daerah sebagai salah satu sumber pendapatan yang berasal dari dalam daerah dapat dikembangkan sesuai kondisi masing-masing daerah. Salah satu faktor yang dapat menunjang pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah adalah faktor pariwisata. Pariwisata juga akan membantu mempercepat proses pertumbuhan ekonomi. Sebab pariwisata bisa dikatakan sebagai penggerak dari sektor-sektor lain seperti sektor industri dan jasa. Dampak positif pariwisata terhadap pembangunan ekonomi antara lain, dampak terhadap penciptaan lapangan kerja, sumber devisa negara dan distribusi pembangunan.

Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 Tentang Kepariwisata yang menyatakan bahwa Penyelenggaraan Kepariwisata ditujukan untuk meningkatkan pendapatan nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, memperluas dan pemeratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja, mendorong pembangunan daerah, memperkenalkan dan mendayagunakan obyek dan daya tarik wisata di Indonesia serta memupuk rasa cinta tanah air dan mempererat persahabatan antar bangsa.

Pemerintah memperoleh pendapatan dari sektor pariwisata dari beberapa cara. Sumbangan pendapatan terbesar dari pariwisata bersumber dari pengenaan pajak dan retribusi. Pajak dan retribusi ini bisa dipungut secara langsung seperti retribusi masuk dan parkir di lokasi objek wisata, pajak hotel dan restoran, biaya visa dan pajak bandara, maupun pajak yang dipungut tidak langsung berupa pajak atas barang-barang yang dibeli oleh wisatawan di daerah tujuan wisata (PPN) dan pajak yang dibayar pengusaha atas keuntungan yang diperoleh akibat bisnis pariwisata. Pendapatan pariwisata adalah bagian dari pendapatan asli daerah yang berasal dari kegiatan kepariwisataan, seperti retribusi tempat rekreasi dan

olahraga, pajak hotel dan restoran, pajak hiburan, dan lainnya.

Pengelolaan pariwisata yang ideal dilakukan bersama-sama antara masyarakat dan pemerintah sehingga terjadi kerjasama yang baik dan berkelanjutan pemerintah dalam hal ini tidak menjadikan masyarakat sebagai obyek, akan tetapi lebih ke *partner*. Begitupula dalam hal pemungutan retribusi objek wisata maka pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan masyarakat sangatlah penting karena keberhasilan pencapaian target retribusi dari objek wisata tentunya akan mempengaruhi pendapatan asli daerah.

Dalam Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 48 Tahun 2006, tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA) Provinsi Jawa Barat, disebutkan bahwa Kawasan Rekreasi Pantai Pangandaran termasuk salah satu dari sembilan Kawasan Wisata Unggulan di Jawa Barat. Serta dalam Perda Jawa Barat No. 22 Tahun 2010 tentang RTRWP Jawa Barat tahun 2009- 2029, kawasan Pangandaran ditetapkan sebagai kawasan strategis provinsi.

Pangandaran merupakan kabupaten di tenggara provinsi Jawa Barat yang memiliki berbagai potensi kepariwisataan. Beberapa objek wisata unggulan di kawasan ini sudah dikenal luas, bahkan hingga mancanegara, antara lain objek wisata Pantai Pangandaran, Cagar Alam Pananjung, Pantai Batu Hiu, Pantai Batu Karas, Pantai Madasari, Citumang, serta

Cukang Taneuh atau yang lebih populer dengan sebutan Green Canyon.

Salah satu objek wisata yang dipilih sebagai objek penelitian ini adalah pantai Batukaras. Keberadaan Pantai Batukaras semakin hari semakin banyak pengunjungnya hal ini dikarenakan keberadaan pantai yang masih bersih dan aksesibilitas untuk menuju objek wisata cukup dekat dari Pantai Pangandaran. Namun demikian potensi objek wisata Pantai Batukaras belum dikembangkan dengan baik sehingga menyebabkan penerimaan retribusi objek wisata belum sesuai dengan target yang ditetapkan. Hal ini dibuktikan dengan data sebagai berikut.

TABEL .1
Realisasi Pendapatan Retribusi Tiket Tanda
Masuk Objek Wisata Pantai Batukaras
Tahun 2015-2019

Tahun	Target	Realisasi	Persentase (%)
2015	571.500.000	697.300.000	122,01
2016	923.325.000	858.095.000	92,94
2017	2.069.924.375	2.277.760.000	110,04
2018	3.953.009.830	2.976.225.000	75,29
2019	4.090.844.188	2.604.620.000	63,67
2020	5.206.528.967	1.746.387.500	33,54

Sumber : Dinas Pariwisata Kabupaten Pangandaran, 2020

Berdasarkan data kontribusi retribusi objek wisata Pantai Batukaras masih adanya yang belum tercapai sesuai target yang ditetapkan seperti pada tahun 2016 target tidak tercapai karena hanya masuk 92.94% dari target yang ditetapkan, begitupula halnya dengan tahun 2018 dari target hanya tercapai sebesar 75,29% dan pada tahun 2019 dari target yang ditetapkan hanya tercapai sebesar 63.67%. begitupula pada tahun 2020 dari target yang ditetapkan hanya tercapai sebesar 33,54 % karena adanya wabah covid-

19 sehingga terjadi penurunan jumlah pengunjung.

Hal ini sejalan dengan hasil pengamatan penulis, terlihat bahwa pendapatan dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran masih rendah, seperti ditunjukkan pada indikator-indikator sebagai berikut :

1. Masih kurangnya memperkuat proses pemungutan retribusi objek wisata Pantai Batukaras hal ini disebabkan petugas pemungut retribusi kurang memiliki kemampuan bertindak tegas dalam melaksanakan pemungutan retribusi objek wisata sehingga target retribusi objek wisata tidak tercapai.
2. Kurangnya dilakukan pengawasan secara rutin terhadap pelaksanaan pemungutan retribusi objek wisata sehingga terindikasi terjadi kecurangan dalam melakukan pelaporan jumlah kunjungan dengan jumlah kunjungan yang sebenarnya. Contohnya : kurangnya dilakukan pengendalian terhadap hasil penungutan retribusi objek wisata secara rutin sehingga belum dapat meminimalisir penyelewengan.
3. Masih kurangnya kerjasama antara petugas retribusi dengan satgas jaga lembur sehingga banyak pengunjung yang tidak membeli tiket dengan alasan ingin berkunjung ke saudaranya justru pergi ke tempat wisata. Contohnya : kurangnya pelibatan satgas jaga lembur di pintu tol dalam membantu meningkatkan penerimaan retribusi wisata.

Berdasarkan uraian permasalahan diatas, peneliti menduga disebabkan oleh tidak optimalnya pemungutan retribusi objek wisata pantai Batukaras

Kabupaten Pangandaran maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dan dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul : "Optimalisasi Pemungutan Retribusi Objek Wisata Pantai Batukaras oleh Petugas Tolgate Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran".

KAJIAN PUSTAKA

Berdasarkan permasalahan yang muncul dalam latar belakang penelitian, maka fokus permasalahan dalam penelitian ini didasarkan pada penerimaan retribusi objek wisata Pantai Batukaras belum optimal. Apabila ditelaah secara mendalam permasalahan tersebut, merupakan salah satu kajian dari bidang kajian ilmu pemerintahan.

Hal itu sebagaimana dijelaskan oleh Ndraha (2010:7) yang mendefinisikan bahwa : "Ilmu pemerintahan sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana pemerintah (unit kerja publik) bekerja memenuhi dan melindungi tuntutan (harapan, kebutuhan) yang diperintah akan jasa publik dan layanan civil, dalam hubungan pemerintahan".

Beranjak dari pandangan tersebut, maka pendekatan analisa teoritis dalam penelitian ini, berdasarkan kaidah-kaidah atau pendekatan teori yang relevan dengan kajian disiplin ilmu pemerintahan. Hal ini didasarkan bahwa pengelolaan retribusi objek wisata dapat mempengaruhi penerimaan daerah sehingga berdampak pada kelancaran proses pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Pariwisata merupakan sumber retribusi terhadap pendapatan daerah yang sangat potensial, hal tersebut terlihat hampir di setiap daerah

mempunyai obyek pariwisata yang menjadi sorotan utama dalam meningkatkan pendapatan asli daerahnya atau menjadi ikon tersendiri dari daerah tersebut. Tidak sedikit daerah yang membentangkan lahannya menjadi lahan pariwisata dan menjadi sorotan publik. Keberadaan objek wisata dapat dioptimalkan dalam peningkatan pendapatan asli daerah. Terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini maka diperlukan pengelolaan retribusi objek wisata.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (Depdikbud, 2015:562) dinyatakan bahwa :”Optimalisasi berasal dari kata optimal yang berarti terbaik, tertinggi. Optimalisasi banyak juga diartikan sebagai ukuran dimana semua kebutuhan dapat dipenuhi dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan”.

Menurut Winardi (2011:363) menyatakan bahwa : ”Optimalisasi adalah ukuran yang menyebabkan tercapainya tujuan. Secara umum optimalisasi adalah pencarian nilai terbaik dari yang tersedia dari beberapa fungsi yang diberikan pada suatu konteks”.

Berdasarkan pendapat tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa optimalisasi adalah hasil yang dicapai sesuai dengan keinginan, jadi optimalisasi merupakan pencapaian hasil sesuai harapan secara efektif dan efisien atau dengan kata lain optimalisasi berarti cara, proses, perbuatan mengoptimalkan dan menunjukkan upaya proses yang direncanakan dan dilaksanakan secara sistematis untuk mencari suatu capaian yang terbaik atau optimal.

Adapun menurut Suandy (2011:231) menyatakan bahwa : “Retribusi merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah selain

pajak yang diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat. Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintah daerah. Kebijakan retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah.

Menurut Pasal 1 ayat (9) Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dinyatakan bahwa Retribusi Tempat Rekreasi yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Retribusi Daerah sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat Rekreasi dan Parawisata.

Berkaitan dengan masalah optimalisasi retribusi objek wisata, maka menurut Adisasmita (2011: 111) terdapat cara-cara dalam mengoptimalkan pemungutan retribusi yang antara lain :

1. Memperluas basis penerimaan
2. Memperkuat proses pemungutan
3. Meningkatkan pengawasan
4. Meningkatkan efisiensi administrasi
5. Meningkatkan kapasitas penerimaan

Berdasarkan pendapat di atas, maka untuk mengoptimalkan pemungutan retribusi objek wisata maka tercapat cara-cara yang harus dilaksanakan dalam melaksanakan pemungutan retribusi sehingga target penerimaan retribusi objek wisata dapat tercapai.

METODE

Metode penelitian dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis. Menurut Nawawi (2013:63), mengemukakan bahwa : “Metode deskriptif analisis dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan, melukiskan keadaan subjek/objek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat, dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan faktor-faktor yang tampak atau sebagaimana adanya.

Lamanya penelitian selama 7 bulan. Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan, studi lapangan (observasi, wawancara dan dokumentasi). Jumlah informan dalam penelitian ini sebanyak 10 orang. Teknik analisa data dengan dengan cara deskriptif, yaitu mengumpulkan data, mengolah data, menganalisa data serta menginterpretasikannya pada data kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pariwisata merupakan sumber retribusi terhadap pendapatan daerah yang sangat potensial, hal tersebut terlihat hampir di setiap daerah mempunyai obyek pariwisata yang menjadi sorotan utama dalam meningkatkan pendapatan asli daerahnya atau menjadi ikon tersendiri dari daerah tersebut. Tidak sedikit daerah yang membentangkan lahannya menjadi lahan pariwisata dan menjadi sorotan publik.

Berkaitan dengan masalah optimalisasi retribusi objek wisata, maka menurut Adismita (2011: 111) terdapat cara-cara dalam

mengoptimalkan pemungutan retribusi yang antara lain :

1. Memperluas basis penerimaan
2. Memperkuat proses pemungutan
3. Meningkatkan pengawasan
4. Meningkatkan efisiensi administrasi
5. Meningkatkan kapasitas penerimaan

Berdasarkan pendapat tersebut maka untuk mengetahui optimalisasi pemungutan retribusi objek wisata Pantai Batukaras oleh Petugas Tolgate Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran, berikut penulis melakukan penelitian melalui wawancara dan observasi yang hasilnya penulis sajikan sebagai berikut:

1. Memperluas basis penerimaan

Tindakan yang dilakukan untuk memperluas basis penerimaan antara lain mengidentifikasi pembayar retribusi baru/potensial dan jumlah seluruh pembayar pajak, memperbaiki basis data objek, memperbaiki penilaian, dan menghitung kapasitas penerimaan dari setiap jenis pungutan. Dengan dilakukannya perluasan nasis penerimaan retribusi maka target penerimaan retribusi dapat tercapai secara optimal.

a. Menambah wahana atraksi wisata di objek wisata Batukaras;

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa dilihat dari dimensi memperluas basis penerimaan retribusi objek wisata dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Pangandaran belum optimal hal ini dikarenakan kurangnya dukungan wahana atraksi yang ada di objek wisata sehingga belum dapat menarik minat wisatawan untuk datang.

Sedangkan menurut menurut Sidik (2015:125) menyatakan bahwa : “Dalam rangka mengoptimalkan penerimaan pendapatan asli daerah maka perlu dilakukan beberapa upaya seperti melakukan pengkajian dan pengembangan potensi dan peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah melalui pungutan pajak daerah dan retribusi daerah.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa pemungutan retribusi objek wisata Pantai Batukaras oleh Petugas Tolgate Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran belum optimal karena belum dilakukan penambahan wahana atraksi wisata sehingga petugas masih kesulitan dalam mencapai target penerimaan retribusi dari objek wisata.

Belum optimalnya penambahan atraksi wisata di objek wisata disebabkan adanya hambatan-hambatan seperti ketersediaan anggaran untuk penambahan atraksi objek wisata terutama untuk tahun 2020-2021 terkendala oleh adanya kebijakan *refocusing* anggaran sehingga hal ini menghambat proses penambahan wahana atraksi di objek wisata. Dengan demikian maka upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala tersebut yaitu dengan meningkatkan kreativitas petugas pemungut retribusi objek wisata dengan menggali potensi sumber retribusi lain untuk meningkatkan target penerimaan retribusi objek wisata sehingga tidak hanya mengandalkan keterbatasan sarana atraksi wisata.

b. Memperluas kapasitas penerimaan retribusi objek wisata.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa belum adanya perluasan kapasitas penerimaan

retribusi objek wisata hal ini dikarenakan tidak ada wahana lain yang dapat dijadikan sebagai sumber penerimaan retribusi sehingga hal ini menyebabkan petugas tidak memiliki sumber penerimaan lain selain retribusi masuk ke objek wisata.

Sedangkan menurut Sutendi (2010:101) menyatakan bahwa :”Untuk meningkatkan kapasitas penerimaan retribusi dilakukan langkah berupa meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait di daerah sehingga dapat membantu dalam meningkatkan penerimaan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Dengan demikian dapat diketahui bahwa untuk meningkatkan penerimaan retribusi objek wisata di Pantai Batukaras maka diperlukan penambahan berbagai sarana dan prasarana yang dapat dijadikan sebagai sumber penerimaan sehingga petugas tidak hanya mengandalkan retribusi masuk objek wisata saja namun ada sumber penerimaan baru untuk menambah penerimaan retribusi objek wisata.

Belum optimalnya penambahan kapasitas penerimaan retribusi objek wisata pantai Batukaras disebabkan adanya hambatan-hambatan yang disebabkan keterbatasan sarana dan prasarana yang ada di objek wisata sehingga belum optimal dalam meningkatkan pendapatan dari retribusi objek wisata.

Dengan demikian maka upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala tersebut yaitu dengan melakukan kerjasama dengan kompepar sehingga dapat membantu menggali potensi yang ada di objek wisata sehingga dapat menambah penerimaan dari retribusi objek wisata di pantai Batukaras.

c. Menambah jumlah petugas pemungut retribusi objek wisata.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa permasalahan ketersediaan jumlah petugas dinilai sudah memadai namun kurang memperhatikan aspek kemanfaatannya dalam mendukung peningkatan penerimaan retribusi objek wisata karena pada kenyataannya petugas yang dibentuk dan dilibatkan kurang memperhatikan kemampuan dan keahliannya dalam membantu petugas dari dinas dalam meningkatkan penerimaan retribusi objek wisata.

Sedangkan menurut Siahaan (2016: 76) menyatakan bahwa : "Untuk meningkatkan kapasitas penerimaan retribusi perlu dilakukan berbagai langkah seperti pembuatan suatu sistem pengendalian yang memadai untuk menjamin ditaatinya prosedur dan kebijakan manajemen yang telah ditetapkan. Pemerintah Daerah perlu melakukan penelitian tentang adakah penerimaan yang tidak disetor ke dalam kas pemerintah daerah dan disalahgunakan oleh petugas di lapangan. Perlu juga diteliti masyarakat yang tidak membayar dan pemberian sanksi.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa peningkatan peran serta masyarakat dalam kegiatan pemungutan retribusi objek wisata dinilai kurang efektif dan efisien dalam meningkatkan penerimaan retribusi objek wisata mengingat tujuan awal dari pembuatan timsus atau petugas jaga lembur dikarenakan adanya penyalahgunaan kewenangan petugas pemungut retribusi namun hal tersebut dinilai kurang efektif karena bukan menambah jumlah petugas namun memperbaiki sistem pengendalian dalam pemungutan retribusi objek

wisata sehingga dapat meminimalisir penyimpangan yang dilakukan oleh petugas pemungut retribusi objek wisata.

Dengan demikian maka adanya hambatan yang dihadapi dalam meningkatkan penerimaan retribusi objek wisata namun bukan disebabkan oleh keterbatasan jumlah sumber daya manusia namun lebih cenderung kepada sistem pengendalian dalam pemungutan retribusi yang tidak berjalan sehingga terdapat penyimpangan dalam pelaksanaannya.

Dengan demikian maka telah diupayakan dengan adanya sistem yang baru sehingga hasil penerimaan retribusi objek wisata langsung disetorkan ke kas daerah hal ini dilakukan supaya tidak ada hasil pemungutan retribusi yang dipegang oleh petugas sehingga dapat langsung setiap hari disetorkan ke kas daerah.

2. Memperkuat proses pemungutan

Strategi lain yang dapat dilakukan dalam meningkatkan penerimaan retribusi yaitu dengan memperkuat proses pemungutan retribusi. Dalam memperkuat proses pemungutan retribusi khususnya pada objek wisata dapat dilakukan dengan memperketat proses pemungutan retribusi masuk objek wisata, meminimalisir pengunjung yang tidak membeli tiket dan memumpuk rasa tanggungjawab petugas pemungut retribusi objek wisata.

a. Memperketat proses pemungutan retribusi masuk objek wisata

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pengetatan proses pemungutan retribusi masuk objek wisata belum optimal karena petugas tidak dapat menerapkan sama kepada setiap pengunjung untuk membayar

retribusi masuk objek wisata hal ini dikarenakan masih saja ada pengunjung yang tidak membayar namun tidak diberikan sanksi.

Sedangkan menurut Soebechi (2012: 128) menyatakan bahwa : “Penerapan kebijakan dan peraturan daerah oleh aparat tentu saja sepenuhnya harus didukung dengan kesadaran masyarakat untuk melakukan pelaporan apabila menemukan pelanggaran-pelanggaran hukum. Melalui partisipasi masyarakat tentu akan memudahkan petugas atau aparat yang berwenang dalam menjalankan tugasnya”.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa peningkatan peran serta masyarakat dalam kegiatan pemungutan retribusi objek wisata dinilai akan efektif dalam meningkatkan penerimaan retribusi objek wisata mengingat dengan kesadaran masyarakat terhadap suatu kebijakan yang telah ditentukan dalam hal ini mengenai ketentuan retribusi masuk objek wisata maka target yang ditetapkan dapat tercapai secara optimal.

Permasalahan tersebut disebabkan adanya hambatan-hambatan yang dihadapi oleh petugas dalam meningkatkan penerimaan retribusi objek wisata dengan mengetatkan pelaksanaan pemungutan retribusi yang antara lain disebabkan masih kurangnya tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar retribusi objek wisata sehingga menyebabkan target penerimaan retribusi tidak tercapai secara optimal.

Oleh karena itu maka petugas telah berupaya dalam melakukan pengetatan terhadap adanya pengunjung yang tidak membayar retribusi objek wisata dengan

melakukan pemilahan kendaraan yang masuk sehingga memudahkan dalam melakukan pemungutan retribusi objek wisata selain itu dengan melibatkan polri dan TNI dalam membantu proses pemungutan sehingga pengunjung yang masuk ke objek wisata dapat membayar retribusi.

b. Meminimalisir pengunjung yang tidak membeli tiket;

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pengetatan pengunjung dalam meningkatkan penerimaan retribusi masuk objek wisata belum optimal karena petugas masih saja ada pengunjung yang tidak membayar retribusi masuk objek wisata dengan mengaku-ngaku pejabat sehingga dinilai pengetatan yang dilakukan kurang efektif.

Sedangkan menurut Farhan (2019: 28) menyatakan bahwa :”Untuk meningkatkan penerimaan retribusi objek wisata maka tempat wisata harus dikelola secara profesional sehingga dapat menarik wisatawan untuk datang berkunjung. Seiring dengan meningkatnya pembayaran retribusi obyek wisata baik perorangan atau badan kepada pemerintah, maka pendapatan asli daerah juga akan meningkat”.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa dalam meningkatkan penerimaan retribusi objek wisata maka perlu dilakukan pengetatan pengunjung yang masuk ke objek wisata untuk dapat meningkatkan penerimaan retribusi objek wisata, namun permasalahan yang terjadi selama ini bahwa pengelola objek wisata kurang profesional sehingga masih saja ada pembiaran terhadap pengunjung yang tidak membayar retribusi masuk objek wisata padahal sesuai dengan ketentuan

siapapun harus membayar retribusi apabila ingin masuk ke objek wisata.

Permasalahan-tersebut disebabkan petugas mengalami hambatan dalam melakukan pengetatan pengunjung karena dalam kenyataannya masih adanya pihak-pihak yang mengaku keluarga pejabat di lingkungan Pemkab Pangandaran sehingga petugas tidak melakukan pemungutan retribusi objek wisata.

Oleh karena itu maka telah diupayakan dengan melakukan pengetatan terhadap semua pengunjung yang masuk dengan cara melakukan penyekatan di awal masuk ke objek wisata serta melakukan pengawasan terhadap setiap pengunjung yang masuk sehingga dapat membayar retribusi sesuai dengan yang telah ditetapkan.

c. Memupuk rasa tanggungjawab petugas pemungut retribusi objek wisata

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa dalam rangka memupuk tanggungjawab petugas pemungut retribusi masuk objek wisata masih kurang optimal hal ini dikarenakan adanya ketidaksesuaian dalam penempatan petugas hal ini terjadi karena kurangnya pengarahan kepada petugas sebelum ditugaskan pada posisinya sehingga hal ini berdampak pada kurang optimalnya pemungutan retribusi masuk objek wisata.

Sedangkan menurut Mahmui (2010:145) menyatakan bahwa : "Perlunya akuntabilitas dalam pelaksanaan pemungutan retribusi yaitu dengan adanya kejelasan fungsi, struktur, system dan pertanggungjawaban semua unsur termasuk petugas. Apabila prinsip ini diterapkan secara efektif, maka akan

ada kejelasan akan fungsi, hak, kewajiban dan wewenang serta tanggung jawab masing-masing petugas pemungut retribusi.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa dalam meningkatkan penerimaan retribusi objek wisata maka perlu adanya tanggungjawab petugas dalam melaksanakan pemungutan retribusi sehingga target penerimaan retribusi dapat tercapai. Namun permasalahan yang terjadi selama ini masih adanya petugas yang kurang memiliki tanggungjawab dalam melaksanakan tugasnya yang mengakibatkan target penerimaan retribusi masuk objek wisata tidak tercapai secara optimal.

Adanya hambatan-hambatan yang dihadapi dalam memupuk tanggungjawab petugas pemungut retribusi masuk objek wisata hal ini dikarenakan adanya ketidaksesuaian dalam penempatan petugas hal ini terjadi karena kurangnya pengarahan kepada petugas sebelum ditugaskan pada posisinya sehingga hal ini berdampak pada kurang optimalnya pemungutan retribusi masuk objek wisata.

Oleh karena itu maka telah dilakukan berbagai upaya dalam memupuk tanggungjawab petugas pemungut retribusi masuk objek wisata dengan cara memberikan pengarahan secara rutin kepada petugas sehingga petugas dapat memahami tugasnya masing-masing dan dengan adanya pengarahan maka petugas timsus maupun petugas jaga lembur dapat memahami tugasnya masing-masing.

3. Meningkatkan pengawasan

Pengawasan yaitu menentukan prosedur apa yang dilakukan dalam menemukan kesalahan, kegagalan daripada rencana dan untuk mencegah

atau memperbaiki kesalahan untuk selanjutnya. Dalam rangka pengelolaan retribusi objek wisata maka diperlukan adanya pengawasan yang dilakukan sebagai prosedur pengendalian terhadap pelaksanaan pemungutan retribusi objek wisata sehingga dapat dilakukan evaluasi untuk memperbaiki permasalahan dalam pelaksanaan pemungutan retribusi objek wisata.

a. Melakukan pemeriksaan pemungutan retribusi objek wisata secara rutin/berkala;

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa kegiatan pengawasan kurang dilakukan secara rutin sehingga petugas kesulitan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapinya karena kurangnya dilakukan pengawasan terhadap proses pemungutan retribusi masuk objek wisata. Sedangkan menurut Adisasmita (2014:128) menyatakan bahwa : “Pengawasan adalah proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya yang dikelola secara sistematis yang bertujuan untuk memaksimalkan dan memanfaatkan sumber daya alam yang dimiliki secara efektif dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya”.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa pengawasan memegang peranan penting sebagai upaya dalam meminimalisir ketimpangan-ketimpangan dalam pemungutan retribusi. Pengawasan adalah proses pemantauan yang dilakukan sebagai langkah untuk dapat mengetahui jalannya kegiatan pelaksanaan dilapangan, apakah sudah sesuai

dengan ketentuan atau perencanaan. Pengawasan digunakan untuk mengetahui fungsi manajemen lainnya, membandingkan kegiatan yang nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan-penyimpangan serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan untuk menjamin sumber daya yang digunakan sudah merupakan cara yang paling efektif.

Adanya hambatan-hambatan yang dihadapi dalam meningkatkan penerimaan retribusi masuk objek wisata hal ini dikarenakan masih jarang nya pelaksanaan pengawasan dari Dinas Pariwisata terhadap petugas pemungut retribusi di lapangan sehingga petugas di lapangan kurang memiliki tanggungjawab dalam melaksanakan tugasnya yang mengakibatkan tidak tercapainya target penerimaan retribusi objek wisata.

Oleh karena itu maka telah dilakukan berbagai upaya dalam meningkatkan penerimaan retribusi masuk objek wisata dengan cara meningkatkan pengawasan secara langsung terhadap proses pemungutan retribusi sehingga petugas dapat bekerja secara optimal dan berbagai penyimpangan dapat diminimalisir.

b. Mengevaluasi proses pengawasan dalam pemungutan retribusi objek wisata setiap saat/kurun waktu tertentu;

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Pangandaran berdasarkan langkahlangkah pengawasan belum terealisasi secara keseluruhan hal tersebut terlihat dari beberapa wawancara yang menyatakan bahwa masih terdapat beberapa permasalahan

yang belum mendapat penanganan yang tepat.

Sedangkan menurut Anwar (2010: 27) menyatakan bahwa : “Dalam proses pengolaan retribusi diperlukan kegiatan yang bertahap mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengimplementasian, hingga pengendalian dan pengawasan. Melalui pengawasan dapat diketahui permasalahan yang terjadi sehingga dapat ditindaklanjuti untuk menyelesaikannya”.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa pengelolaan retribusi objek wisata dalam peningkatan pendapatan asli daerah Kabupaten Pangandaran belum dilaksanakan sesuai dengan dimensi pengawasan karena dalam kenyataannya prosedur pengendalian dalam pelaksanaan pemungutan retribusi objek wisata belum dapat dipahami oleh semua petugas pemungut retribusi objek wisata sehingga menyebabkan kurangnya dilakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan retribusi objek wisata yang dilakukan oleh petugas yang menyebabkan evaluasi yang dilakukan belum dapat memperbaiki permasalahan dalam pelaksanaan pemungutan retribusi objek wisata.

Adanya hambatan-hambatan yang dihadapi dalam meningkatkan penerimaan retribusi objek wisata hal ini dikarenakan kurangnya dilakukan pengendalian terhadap proses pemungutan retribusi masuk objek wisata sehingga menyebabkan terlambatnya proses perbaikan terhadap permasalahan yang terjadi dalam proses pemungutan retribusi objek wisata.

Oleh karena itu maka telah dilakukan berbagai upaya yang antara lain meningkatkan kegiatan evaluasi terhadap proses pemungutan retribusi masuk objek wisata sehingga permasalahan yang terjadi dapat diselesaikan secara cepat dan petugas akan memiliki pemahaman dalam menyelesaikan setiap tugasnya karena permasalahannya dapat langsung ditindaklanjuti secara cepat.

4. Meningkatkan efisiensi administrasi

Dalam hal ini, yang dilakukan ialah memperbaiki prosedur administrasi pajak melalui penyederhanaan administrasi pajak dan meningkatkan efisiensi pemungutan dari setiap jenis pemungutan. Dengan adanya efisiensi administrasi maka diharapkan dapat mempercepat proses pemungutan retribusi sehingga menghasilkan pencapaian target yang optimal.

Meningkatkan efisiensi administrasi dan menegaskan biaya pemungutan yaitu tindakan yang dilakukan oleh daerah anatara lain memperbaiki prosedur administrasi melalui penyederhanaan administrasi. dan meningkatka pengoptimalan terhadap pemungutan retribusi.

a. Memperbaiki prosedur administrasi dalam pemungutan retribusi objek wisata;

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa sudah dilakukan tindakan perbaikan dan penyederhanaan dalam pelaporan administrasi pemungutan retribusi objek wisata yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Pangandaran berdasarkan langkah-langkah pengawasan belum terealisasi secara keseluruhan hal tersebut terlihat dari beberapa wawancara yang

menyatakan bahwa masih terdapat beberapa permasalahan yang belum mendapat penanganan yang tepat.

Sedangkan menurut Marihot (2008: 127) menyatakan bahwa : “Perlu adanya upaya yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah melalui optimalisasi intensifikasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, antara lain memperbaiki prosedur administrasi pajak melalui penyederhanaan administrasi pajak, meningkatkan efisiensi pemungutan dari setiap jenis pemungutan.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa dalam meningkatkan penerimaan retribusi objek wisata maka diperlukan upaya meningkatkan penyederhanaan dalam pelaporan administrasi pemungutan retribusi objek wisata dalam rangka peningkatan pengawasan dengan harapan pendapatan daerah meningkat secara signifikan.

Adanya hambatan-hambatan yang dihadapi dalam memperbaiki prosedur administrasi dalam pemungutan retribusi objek wisata hal ini dikarenakan masih adanya petugas yang kurang memahami ketentuan yang baru sehingga petugas tidak langsung menyetorkan hasil penerimaan retribusi objek wisata.

Oleh karena itu maka telah dilakukan berbagai upaya dalam memperbaiki prosedur administrasi dalam pemungutan retribusi objek wisata seperti merubah administrasi penyetoran penerimaan retribusi objek wisata yang biasanya di setor ke Dinas Pariwisata sebelum disetor ke kas daerah namun sekarang petugas pemungut retribusi diharuskan menyetorkan langsung ke kas daerah

setiap harinya sehingga petugas tidak memegang hasil pemungutan retribusi karena setiap harinya dapat langsung disetorkan.

b. Meningkatkan efisiensi dalam pemungutan retribusi objek wisata.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa tindakan efisiensi untuk biaya pemungutan retribusi objek wisata yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Pangandaran belum optimal mengingat masih banyaknya jumlah petugas yang berjaga di tollgate masuk objek wisata Batukaras sehingga kurang efisien karena akan menimbulkan biaya yang besar.

Sedangkan menurut Anthony dan Govindarajan (2005 : 174) menyatakan bahwa : “Efisiensi merupakan ratio antara (output) dan (input) atau jumlah output per unit input. Dengan demikian maka operasi suatu organisasi dapat dikatakan efisien apabila organisasi tersebut mampu memperoleh hasil tertentu dengan menggunakan input yang serendah-rendahnya. Agar suatu organisasi dapat dikelola secara efisien, para anggota organisasi harus dapat melaksanakan program efisiensi disegala bidang kegiatan, baik kegiatan pokok maupun kegiatan penunjang”.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa dalam meningkatkan penerimaan retribusi objek wisata maka diperlukan upaya meningkatkan efisiensi dalam hal pengeluaran biaya operasional sehingga tidak mengurangi penerimaan yang terlalu besar dan berdampak pada tidak tercapainya target oleh karena itu maka petugas pemungut retribusi objek wisata harus melakukan efisiensi dalam pengeluaran operasional.

Adanya hambatan-hambatan yang dihadapi dalam meningkatkan efisiensi dalam pemungutan retribusi objek wisata hal ini dikarenakan terlalu banyaknya petugas pemungut retribusi sehingga menyebabkan meningkatnya pengeluaran operasional untuk pemungutan retribusi objek wisata. Pada saat ini petugas pemungut retribusi terdiri dari petugas pemungut dari Dinas Pariwisata, tim khusus dan petugas jaga lembur sehingga hal ini mengakibatkan biaya yang harus dikeluarkan meningkat.

Oleh karena itu maka telah dilakukan berbagai upaya dalam meningkatkan efisiensi dalam pemungutan retribusi objek wisata yaitu dengan melakukan pembagian petugas yang melakukan pemungutan retribusi sehingga tidak semua petugas datang pada hari yang sama untuk memungut retribusi namun dilakukan rolling petugas sehingga beban operasional untuk pemungutan retribusi dapat lebih efisien.

5. Meningkatkan kapasitas penerimaan

Optimalisasi sumber-sumber PAD perlu dilakukan untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah. Untuk itu diperlukan intensifikasi dan ekstensifikasi subyek dan obyek pendapatan. Dalam jangka pendek kegiatan yang paling mudah dan dapat segera dilakukan adalah dengan melakukan intensifikasi terhadap obyek atau sumber pendapatan daerah yang sudah ada terutama melalui pemanfaatan teknologi informasi. Dengan melakukan efektivitas dan efisiensi sumber atau obyek pendapatan daerah, maka akan meningkatkan produktivitas PAD tanpa harus melakukan perluasan sumber atau obyek pendapatan baru

yang memerlukan studi, proses dan waktu yang panjang.

a. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait di daerah dalam pemungutan retribusi objek wisata;

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa telah dilakukan koordinasi oleh Dinas Pariwisata yang melibatkan pihak terkait sehingga proses pemungutan retribusi dapat dicapai secara optimal hal ini karena dengan banyaknya jumlah petugas maka akan memperlancar proses pemungutan retribusi objek wisata.

Sedangkan menurut Marihot, (2011: 90) menyatakan bahwa : “Untuk meningkatkan kapasitas penerimaan retribusi maka diperlukan dukungan sumber-sumber melalui perencanaan yang lebih baik, hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait di daerah sehingga kebutuhan sumber daya manusia, anggaran dan sarana prasarana dapat terpenuhi”.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa dalam meningkatkan penerimaan retribusi objek wisata maka diperlukan upaya meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait sehingga dapat meningkatkan penerimaan retribusi objek wisata hal ini dapat dilakukan dengan bekerjasama dengan Dinas Perhubungan maupun Polri dan TNI terutama pada hari-hari tertentu dimana pengunjung sedang banyak.

Adanya hambatan-hambatan yang dihadapi dalam meningkatkan koordinasi dengan petugas terkait dalam membantu proses pemungutan retribusi objek wisata sehingga target penerimaan retribusi objek wisata tidak tercapai secara optimal. Hal ini disebabkan petugas terkait hanya

datang pada saat pengunjung banyak saja sementara untuk hari-hari biasa tidak datang dalam membantu pemungutan retribusi objek wisata.

Oleh karena itu maka telah dilakukan berbagai upaya dalam meningkatkan koordinasi dalam pemungutan retribusi objek wisata yaitu dengan meningkatkan koordinasi dengan petugas jaga lembur sehingga proses pemungutan retribusi lebih efektif dan efisien karena semua pihak membantu proses pemungutan retribusi objek wisata.

b. Meningkatkan target capaian pemungutan retribusi objek wisata.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Petugas kesulitan dalam mencapai target penerimaan retribusi yang telah ditetapkan oleh Dinas Pariwisata hal ini karena seringkali terjadi penutupan objek wisata sehingga menyebabkan target penerimaan retribusi objek wisata tidak tercapai.

Sedangkan menurut Kustiawan, (2015: 90) menyatakan bahwa : “Dalam memperkuat pelaksanaan proses pemungutan retribusi maka upaya yang dapat dilakukan dalam memperkuat proses pemungutan, yaitu antara lain mempercepat penyusunan Perda, mengubah tarif, khususnya tarif retribusi dan peningkatan SDM sehingga target pelaksanaan pemungutan retribusi dapat tercapai.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa dalam meningkatkan penerimaan retribusi objek wisata maka penentuan target merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan penerimaan retribusi objek wisata namun pada saat ini penentuan target yang terlalu tinggi tidak akan tercapai mengingat seringkali penutupan objek wisata yang

menyebabkan hilangnya sumber penerimaan dari retribusi masuk objek wisata.

Adanya hambatan-hambatan yang dihadapi dalam mencapai target penerimaan retribusi objek wisata yang ditetapkan hal ini dikarenakan adanya wabah covid-19 menyebabkan objek wisata Batukaras sering di tutup sehingga menyebabkan hilangnya penerimaan retribusi objek wisata.

Oleh karena itu maka telah dilakukan berbagai upaya dalam mencapai target retribusi objek wisata hal ini dilakukan dengan memperbaiki proses pemungutan retribusi objek wisata yang dinilai masih kurang efektif dan efisien serta menambah waktu proses pemungutan retribusi sehingga tidak hanya dilakukan pada siang hari saja dalam memungut retribusi namun bisa ditambah waktunya sampai malam hari sehingga hasil pemungutan retribusi lebih optimal.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka penulis menyimpulkan sebagai berikut :

Pemungutan retribusi objek wisata Pantai Batukaras oleh Petugas Tolgate Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran belum dilaksanakan secara optimal sesuai dengan pendapat Adisasmita (2011: 111) sehingga target penerimaan retribusi tidak tercapai hal ini dikarenakan masih kurangnya kemampuan petugas dalam melakukan pemungutan retribusi objek wisata, selain itu kurangnya kesadaran pengunjung dalam membayar retribusi objek wisata serta kurangnya dilakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan retribusi objek wisata.

Selain itu kurangnya koordinasi dengan pihak terkait seperti petugas jaga lembur dan petugas pemungut retribusi sehingga kurang terjalin kerjasama dalam proses pemungutan retribusi objek wisata.

Adanya hambatan-hambatan petugas dalam melaksanakan pemungutan retribusi objek wisata yang antara lain masih kurangnya dilakukan pelatihan kepada petugas pemungut retribusi objek wisata serta kurangnya koordinasi dan kerjasama berbagai pihak terkait dalam proses pemungutan retribusi objek wisata sehingga masih ada pengunjung yang tidak membayar tiket masuk objek wisata.

Adanya upaya yang dilakukan dalam mengatasi berbagai hambatan dalam pemungutan retribusi objek wisata yang antara lain melaksanakan pelatihan serta meningkatkan pemahaman petugas terhadap prosedur pengendalian dalam pemungutan retribusi objek wisata sehingga dapat mengoptimalkan pencapaian target pemungutan retribusi objek wisata, meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan berbagai pihak seperti petugas pemungut retribusi, satgas jaga lembur dan masyarakat pantai Batukaras sehingga dapat membantu petugas dalam melaksanakan pemungutan retribusi objek wisata.

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian maka penulis menyampaikan saran sebagai berikut :

1. Sebaiknya dalam pemungutan retribusi objek wisata petugas diberikan pengarahan dan sosialisasi terkait dengan mekanisme pemungutan retribusi objek wisata secara jelas sehingga petugas dapat melaksanakan

tugasnya dengan baik serta dilakukan penjadwalan bagi petugas sehingga tidak banyak petugas yang melakukan pemungutan retribusi di hari yang sama hal ini karena akan menyebabkan besarnya pengeluaran untuk petugas pemungut retribusi objek wisata.

2. Untuk mengatasi hambatan-hambatan maka sebaiknya meningkatkan pengawasan dan pengendalian dalam proses pemungutan retribusi objek wisata sehingga hasil pemungutan retribusi dapat langsung di setorkan ke kas daerah serta memberikan sanksi yang tegas kepada pengunjung yang tidak membeli tiket masuk objek wisata.

3. Untuk meningkatkan upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan-hambatan sebaiknya Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran tidak hanya menetapkan target penerimaan retribusi objek wisata yang tinggi namun perlu memperhatikan berbagai fasilitas pendukung yang ada di objek wisata sehingga dapat menarik minat pengunjung untuk datang ke objek wisata yang ada di Kabupaten Pangandaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo. (2011). *Manajemen Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu.
- Adrian Sutedi, (2008). *Hukum Pajak dan Retribusi Daerah*. Ghalia Indonesia: Bogor.
- Bambang Riyanto. (2003). *Dasar-Dasar Pembelanjaan Perusahaan*, Edisi keempat

- Yayasan Penerbit FE UGM, Yogyakarta.
- Kaho. (2007). *Prospek Otonomi Daerah Di Negara Republik Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Kunarjo. (2008). *Pajak dan Retribusi Daerah (Pengelolaan Pemerintah Daerah Dalam Aspek Keuangan, Pajak dan Retribusi Daerah)*. Jakarta: Grasindo.
- Munawir, (2008), *Analisis Laporan Keuangan, Edisi Keempat, Cetakan Ketiga belas*, Penerbit Liberty, Yogyakarta.
- Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olahraga
- Samudra, (2005). *Retribusi Daerah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Siahaan, Marihot P, S.E. (2005). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: PT Raja. Grafindo Persada.
- Suandy. (2011). *Perencanaan Pajak*, Edisi 5. Jakarta: Salemba Empat.
- Undang-Undang No 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah
- Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah
- Zuraida, (2013), *Teknik Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*, Sinar Grafika, Jakarta.